

HUBUNGAN TINGKAT LITERASI DIGITAL DENGAN PEMANFAATAN LAYANAN BERBASIS E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SIBERAS DI DESA SIPODECENG

Nadia Nurapriila¹, Hariyanti Hamid², Barisan³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: nadianurapriila77@gmail.com

Email: hariyantihamid2169@gmail.com; uchenklppmstisip@yahoo.co.id

ABSTRACT

Digital literacy is a key factor determining the extent to which communities are able to optimally utilize e-government-based services. The low level of digital literacy in rural communities is a major obstacle to the implementation of e-government at the village level, including the use of the SIBERAS application in Sipodeceng Village. The purpose of this study was to examine the relationship between digital literacy levels and the use of e-government-based services through SIBERAS. In addition, this study also attempted to identify factors influencing low digital literacy levels in the community. With a population of 1,362 heads of families, a quantitative descriptive approach was used; 93 respondents were selected through probability sampling. Data collection was through observation, questionnaires, library research, and documentation. Analysis was conducted using descriptive statistics, simple linear regression, and Pearson Product Moment and Spearman Rank correlations. SPSS was used. The results showed a positive, strong, and significant relationship between digital literacy levels and the use of e-government services ($r = 0.875$; $R^2 = 76.6\%$). Descriptively, community digital literacy was in the moderate category (58.4%), as was the use of e-government services (47.9%). The four main factors inhibiting digital literacy are demographic factors, limited access to digital infrastructure, minimal experience in targeted technology use, and weak social and educational support. The alternative hypothesis (H_a) is accepted, confirming that digital literacy has a significant influence.

Keywords: Digital Literacy, E-Government, SIBERAS.

ABSTRAK

Literasi digital merupakan faktor kunci yang menentukan sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan layanan berbasis e-government secara optimal. Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat perdesaan menjadi hambatan utama implementasi e-government di tingkat desa, termasuk pemanfaatan aplikasi SIBERAS di Desa Sipodeceng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan antara tingkat literasi digital dan penggunaan layanan berbasis e-government melalui SIBERAS. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi digital yang rendah di masyarakat. Dengan populasi 1.362 kepala keluarga, pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan; 93 responden dipilih melalui probabilitas sampling. Pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, penelitian pustaka, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, regresi linear sederhana, dan korelasi Pearson Product Moment dan Spearman Rank. SPSS digunakan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif, kuat, dan signifikan antara tingkat literasi digital dan pemanfaatan layanan e-government ($r = 0,875$; $R^2 = 76,6\%$). Secara deskriptif, literasi digital masyarakat berada pada kategori sedang (58,4%), begitu pula pemanfaatan layanan e-government (47,9%). Empat faktor utama yang menghambat literasi digital adalah faktor demografis, keterbatasan akses infrastruktur digital, minimnya pengalaman penggunaan teknologi secara terarah, dan lemahnya dukungan sosial dan pendidikan. Hipotesis alternatif (H_a) diterima, menegaskan bahwa literasi digital berpengaruh signifikan.

Kata kunci: Literasi Digital, E-Government, SIBERAS.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan era Society 5.0 menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang cerdas, terintegrasi, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. E-government, yang didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada warga negara (Indrajit, 2002), telah diadopsi oleh 193 negara anggota PBB, dan aksesibilitas layanan telah meningkat sebesar 15% sejak 2020 (Nations, 2022). Di Indonesia, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menjadi landasan hukum percepatan transformasi digital pemerintahan (Indonesia, 2018). Keberhasilan implementasi e-government sangat bergantung pada tingkat literasi digital masyarakat. Gilster (1997, dalam Firdamf et al., 2025) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan memahami dan menggunakan berbagai bentuk informasi dari sumber digital sebagai bagian dari proses pembelajaran sehari-hari (Firdamf et al., 2025).

Hingga 2024 terdapat sekitar 14.000 desa di Indonesia yang telah menerapkan program digitalisasi, namun penetrasi internet di pedesaan hanya 30,5%, jauh tertinggal dibandingkan perkotaan yang mencapai 69,5% ((APJII), 2024). Indeks Literasi Digital Indonesia mencapai 3,78 dari skala 5 pada tahun 2024, masih berada pada kategori sedang (Informatika et al., 2024). Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan dalam pemerataan infrastruktur dan peningkatan literasi digital aparatur serta masyarakat (Salsabila, 2024).

Aplikasi SIBERAS (Sistem Informasi BUMDES dan Manajemen Kelurahan/Desa) di Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, mulai diterapkan sejak 2021 sebagai wujud nyata implementasi e-government di tingkat desa. Namun, data lapangan menunjukkan kesenjangan yang mengkhawatirkan: dari total 1.362 kepala keluarga, hanya 1.075 KK (78,89%) yang tercatat dalam sistem SIBERAS, dan sejak fitur layanan mandiri diaktifkan, hanya 1 orang warga (0,07%) yang pernah memanfaatkannya secara independen. Dari total 1.561 permohonan layanan administrasi pada 2025, sebanyak 640 permohonan (40,98%) masih dilakukan secara manual. Fenomena ironis ini investasi besar pada teknologi namun tidak dibarengi adopsi masyarakat menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada ketersediaan sistem, melainkan pada kapasitas literasi digital warga untuk memanfaatkannya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip e-government sebagai instrumen good governance yang seharusnya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat (Indrajit, 2002).

Penelitian ini menjadi urgen dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, secara teoritis, kesenjangan antara ketersediaan teknologi dan pemanfaatan aktualnya mengindikasikan kegagalan mencapai tujuan good governance yang menjadi esensi e-government. Kedua, secara empiris, fenomena di Desa Sipodeceng merepresentasikan kondisi riil banyak desa di Indonesia yang belum banyak dikaji, khususnya dari perspektif Administrasi Publik. Ketiga, secara praktis, pemahaman tentang hubungan literasi digital dengan adopsi layanan e-government akan memberikan landasan bagi pemerintah desa dalam merancang strategi intervensi yang lebih efektif. Keempat, secara kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan program literasi digital nasional yang lebih tepat sasaran di wilayah pedesaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui hubungan tingkat literasi digital dengan pemanfaatan layanan berbasis e-government melalui aplikasi SIBERAS di Desa Sipodeceng; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat literasi digital masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif; metode ini secara sistematis menggambarkan fenomena dan menggunakan data numerik untuk mengukur hubungan antar variabel (Sugiyono, 2018). Penelitian dilakukan di Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan berlangsung selama dua bulan (Januari hingga Februari 2026).

Penelitian melibatkan semua kepala keluarga di Desa Sipodeceng, yang berjumlah 1.362 KK. Sampling diambil menggunakan teknik probability sampling dengan tingkat kepercayaan 90% dan rumus Slovin. Sebanyak 93 orang yang berpartisipasi dalam penelitian tersebut diambil.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) observasi langsung di lapangan; (2) kuesioner terstruktur menggunakan skala Likert (1–5); (3) studi pustaka; dan (4) dokumentasi. Variabel penelitian terdiri atas: variabel bebas (X) yaitu tingkat literasi digital dengan indikator berdasarkan teori Gilster, 1997 dalam Firdamf, 2025: pencarian informasi di internet, pandu arah (hypertextual navigation), evaluasi konten informasi, dan penyusunan pengetahuan; serta variabel terikat (Y) yaitu pemanfaatan layanan e-government dengan indikator berdasarkan teori Davis (1989): frekuensi dan intensitas penggunaan, tingkat kemudahan dan kepuasan pengguna, dampak pada efisiensi layanan, dan tingkat partisipasi masyarakat (Firdamf et al., 2025)(Davis, 1989). Analisis data menggunakan: (1) uji validitas dan reliabilitas instrumen; (2) statistik deskriptif; (3) uji korelasi Pearson Product Moment dan Spearman Rank; (4) analisis regresi linear sederhana; serta (5) uji hipotesis (uji-t). Seluruh analisis dilakukan dengan bantuan program SPSS.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Sipodeceng dan Aplikasi SIBERAS

Desa Sipodeceng terletak di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan jumlah penduduk sekitar 4.215 jiwa yang terdiri dari 1.362 kepala keluarga. Secara geografis, desa ini merupakan wilayah pedesaan dengan akses infrastruktur digital yang masih terbatas dibandingkan wilayah perkotaan. Sistem Informasi BUMDES dan Manajemen Kelurahan/Desa (SIBERAS) merupakan platform digital yang dirancang untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tata kelola administrasi desa, meliputi pengelolaan data kependudukan, layanan administrasi mandiri, dan manajemen BUMDes (Mustanir et al., 2021). SIBERAS di Desa Sipodeceng mulai diterapkan sejak 2021 melalui pendampingan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (Khalik et al., 2023).

Tingkat Literasi Digital Masyarakat

Merujuk pada teori Gilster (1997, dalam Firdamf et al., 2025), literasi digital mencakup empat kompetensi inti: pencarian informasi di internet (internet searching), pandu arah (hypertextual navigation), evaluasi konten informasi (content evaluation), dan penyusunan pengetahuan (knowledge assembly) (Firdamf et al., 2025). Pengukuran terhadap keempat indikator ini pada masyarakat Desa Sipodeceng menunjukkan bahwa tingkat literasi digital berada pada kategori sedang, dengan skor rata-rata 58,4%. Secara rinci, pencarian informasi di internet memperoleh rata-rata 42,7%, pandu arah (hypertextual navigation) 41,6%, evaluasi konten informasi 42,6%, dan penyusunan pengetahuan (knowledge assembly) 46,3%. Indikator pandu arah dan evaluasi konten menjadi yang terendah, mengkonfirmasi temuan Bawden (2008) bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan mengoperasikan perangkat, melainkan mencakup kemampuan berpikir kritis dan navigasi informasi secara mandiri dua kompetensi yang justru paling lemah pada masyarakat pedesaan (Bawden, 2008). Kondisi ini selaras dengan catatan nasional Indeks Literasi Digital 2024 yang masih berada pada skor 3,78 dari skala 5, kategori sedang (Informatika et al., 2024).

Dari perspektif Bawden (2008), faktor akses infrastruktur merupakan determinan penting literasi digital (Bawden, 2008). Data penelitian ini mengkonfirmasi hal tersebut: meskipun 59% responden telah memiliki smartphone, pemanfaatannya masih terbatas pada komunikasi dan hiburan, belum diarahkan untuk keperluan administrasi digital. Kondisi ini mencerminkan konsep technology use gap yang dikemukakan Venkatesh et al. (2003) dalam model UTAUT, di mana kepemilikan perangkat (facilitating conditions) tidak otomatis menghasilkan pemanfaatan yang optimal tanpa disertai keterampilan dan motivasi yang memadai (Venkatesh et al., 2003). Ketersediaan jaringan internet di rumah yang masih relatif terbatas semakin memperdalam kesenjangan ini. Yang paling kritis, sebanyak 53,8% responden

menyatakan belum pernah mendapat pendampingan teknis dari pemerintah desa dalam menggunakan SIBERAS, padahal dukungan sosial dan pelatihan merupakan salah satu faktor penentu adopsi teknologi menurut Bawden (2008).

Tabel 1: Rekapitulasi Indikator Tingkat Literasi Digital

No.	Indikator Tingkat Literasi Digital	Rata-rata Persentase
1	Pencarian informasi di internet	42,7%
2	Pandu arah (hypertextual navigation)	41,6%
3	Evaluasi konten informasi	42,6%
4	Penyusunan pengetahuan (knowledge assembly)	46,3%
	Rata-rata keseluruhan	58,4% (Sedang)

Pemanfaatan Layanan E-Government melalui SIBERAS

Tingkat pemanfaatan layanan e-government melalui aplikasi SIBERAS berada di kategori sedang dengan skor rata-rata 47,9%. Dari 1.561 permohonan layanan administrasi pada tahun 2025, sebanyak 640 permohonan (40,98%) masih dilakukan secara manual, sementara 921 permohonan (58,97%) diinput secara online oleh operator desa. Hanya 1 orang warga (0,07%) yang pernah memanfaatkan layanan mandiri SIBERAS secara independen. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui kerangka Technology Acceptance Model (TAM) Davis (1989), yang menegaskan bahwa pemanfaatan sistem teknologi ditentukan oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan kemanfaatan (*perceived usefulness*) (Davis, 1989). Ketika masyarakat tidak memiliki literasi digital yang memadai, kedua persepsi tersebut cenderung negatif sehingga menghambat adopsi layanan digital. Data penelitian ini mengkonfirmasi hal tersebut: indikator kemudahan operasi SIBERAS hanya berada di skor sedang, sementara frekuensi penggunaan dan keterlibatan aktif masyarakat secara mandiri hampir tidak terjadi. Kondisi ini juga memperkuat temuan Weerakkody et al. (2013) bahwa kebiasaan menggunakan layanan tradisional dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem online menjadi hambatan signifikan dalam transformasi digital pemerintahan, khususnya di komunitas pedesaan yang belum terpapar teknologi secara terstruktur (Weerakkody et al., 2013).

Tabel 2: Rekapitulasi Indikator Pemanfaatan Layanan E-Government

No.	Indikator Pemanfaatan Layanan E-Government	Rata-rata Persentase
1.	Frekuensi penggunaan	78,6%
2.	Intensitas penggunaan	80,6%
3.	Tingkat kemudahan	73,6%
4.	Kepuasan pengguna	64,2%
5.	Dampak pada efisiensi layanan	62,8%
6.	Tingkat partisipasi masyarakat	72,4%
	Rata-rata Keseluruhan	47,9% (Sedang)

Berdasarkan Tabel 2, indikator dengan capaian tertinggi adalah intensitas penggunaan (80,6%) dan frekuensi penggunaan (78,6%), menunjukkan bahwa operator desa relatif aktif menginput data melalui SIBERAS. Sebaliknya, indikator dampak pada efisiensi layanan (62,8%) dan kepuasan pengguna

(64,2%) menjadi yang terendah, mengindikasikan bahwa meskipun sistem digunakan, manfaat efisiensi yang seharusnya menjadi keunggulan e-government belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dalam perspektif TAM Davis (1989), rendahnya kepuasan pengguna berkorelasi langsung dengan lemahnya perceived usefulness, yang menjadi penghambat utama adopsi mandiri layanan digital (Davis, 1989). Rata-rata keseluruhan pemanfaatan layanan e-government berada pada 47,9% (kategori sedang), sebuah angka yang secara nyata masih jauh dari potensi optimal sistem SIBERAS yang dirancang untuk melayani 1.362 kepala keluarga secara mandiri.

Hubungan Literasi Digital dengan Pemanfaatan Layanan E-Government

Hasil uji korelasi Pearson Product Moment menunjukkan nilai $r = 0,875$ ($p = 0,000 < 0,001$), yang mengkategorikan hubungan antara tingkat literasi digital (X) dan pemanfaatan layanan e-government (Y) ke dalam kategori sangat kuat dan signifikan. Nilai ini melampaui ambang batas korelasi kuat ($r > 0,70$) yang digunakan secara umum dalam kajian ilmu sosial (Sugiyono, 2018). Temuan ini menegaskan kerangka teoritis Gilster (1997, dalam Firdamf et al., 2025) bahwa literasi digital merupakan prasyarat fundamental bagi pemanfaatan layanan digital, termasuk e-government (Firdamf et al., 2025). Hasil ini diperkuat oleh uji korelasi Spearman Rank yang juga menunjukkan nilai sangat kuat ($r_s = 0,871$, $p < 0,001$).

Tabel 3: Hasil Uji Korelasi dan Regresi

Uji Statistik	Nilai	Keterangan
Pearson Correlation (r)	0,875	Hubungan sangat kuat
Sig. (2-tailed)	0,000 (< 0,001)	Signifikan
Koefisien Determinasi (R ²)	0,766 (76,6%)	Kontribusi X terhadap Y
Persamaan Regresi	$Y = 1,847 + 0,432X$	Positif & signifikan
Uji-t (t hitung)	16,887 > t tabel (1,986)	Ha diterima

Persamaan regresi linear sederhana $Y = 1,847 + 0,432X$ bermakna bahwa setiap peningkatan satu satuan literasi digital akan mendorong peningkatan pemanfaatan layanan e-government sebesar 0,432 satuan. Nilai koefisien determinasi $R^2 = 76,6\%$ menunjukkan bahwa 76,6% variasi dalam pemanfaatan layanan e-government dapat dijelaskan oleh tingkat literasi digital, sedangkan 23,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kepercayaan terhadap sistem, motivasi, dan dukungan sosial. Dalam kerangka Digital Era Governance yang dikemukakan Dunleavy (2006), efektivitas e-government di tingkat desa tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kapasitas literasi digital warganya (Dunleavy et al., 2006). Nilai R^2 sebesar 76,6% ini sangat tinggi untuk konteks kajian perilaku sosial dan mengkonfirmasi posisi literasi digital sebagai determinan utama pemanfaatan layanan e-government di Desa Sipodeceng. Hasil penelitian ini konsisten dengan kajian sebelumnya, antara lain Prasetyo (2022) dan Sokpro (2024) yang menegaskan literasi digital sebagai prediktor utama adopsi layanan e-government (Prasetyo, 2022)(Sokpro, 2024).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Literasi Digital

Berdasarkan analisis data dan kajian literatur, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat literasi digital masyarakat Desa Sipodeceng dalam memanfaatkan layanan e-government: Pertama, faktor demografis. Sebanyak 42,6% responden berpendidikan dasar (SD/SMP), membentuk kelompok yang paling rentan terhadap kesenjangan digital. Temuan ini secara langsung mengkonfirmasi kerangka teoritis Bawden (2008) yang menegaskan bahwa faktor demografis terutama tingkat pendidikan merupakan determinan primer kapasitas literasi digital individu (Bawden, 2008).

Lebih jauh, Passaretta & Gil-Hernández (2023) menekankan bahwa kesenjangan literasi digital berbasis pendidikan ini bersifat kumulatif dan berdampak jangka panjang, menciptakan stratifikasi digital yang sulit diatasi tanpa intervensi struktural (Passaretta & J. Gil-Hernández, 2023). Data penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok responden dengan pendidikan SMA ke atas memiliki skor literasi digital dan pemanfaatan SIBERAS yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan kelompok berpendidikan dasar, mengkonfirmasi hubungan positif antara pendidikan formal dan kapasitas digital (Bawden, 2008) (Passaretta & J. Gil-Hernández, 2023).

Kedua, keterbatasan akses infrastruktur digital. Meskipun sebagian masyarakat telah memiliki smartphone dan akses internet, pemanfaatannya masih terbatas pada komunikasi dan hiburan, belum diarahkan secara optimal untuk keperluan administrasi desa. Hal ini mencerminkan konsep *technology use gap* dalam model UTAUT Venkatesh et al. (2003), di mana kepemilikan perangkat (*facilitating conditions*) tidak secara otomatis menghasilkan pemanfaatan yang produktif tanpa disertai kompetensi digital (Venkatesh et al., 2003). Kesenjangan ini selaras dengan data nasional APJII (2024) yang mencatat penetrasi internet pedesaan hanya 30,5% ((APJII), 2024).

Ketiga, minimnya pengalaman penggunaan teknologi secara terarah. Sebanyak 59% responden memiliki pengalaman yang sangat terbatas dalam mengoperasikan aplikasi digital untuk kebutuhan administrasi. Dalam kerangka model UTAUT (Venkatesh et al., 2003), pengalaman (*experience*) merupakan variabel moderator penting yang mempengaruhi hubungan antara *effort expectancy* dan niat penggunaan teknologi (Venkatesh et al., 2003). Minimnya pengalaman terarah menyebabkan masyarakat tidak mampu mengembangkan *effort expectancy* yang positif terhadap SIBERAS, sehingga cenderung kembali ke layanan konvensional. Kondisi ini memperkuat temuan Weerakkody et al. (2013) bahwa kebiasaan menggunakan layanan tradisional dan minimnya pengalaman teknologi menjadi hambatan kuat dalam transformasi digital pemerintahan, terutama di komunitas pedesaan yang belum terpapar ekosistem digital secara terstruktur (Weerakkody et al., 2013).

Keempat, lemahnya dukungan sosial dan pendidikan. Sebanyak 53,8% responden menyatakan tidak tersedia pendampingan teknis ketika mengalami kesulitan menggunakan SIBERAS, sementara pelatihan formal dari pemerintah desa hampir tidak pernah dilaksanakan. Dalam teori UTAUT (Venkatesh et al., 2003), *social influence* yakni persepsi bahwa orang-orang penting berpendapat seseorang harus menggunakan sistem merupakan determinan signifikan niat penggunaan teknologi (Venkatesh et al., 2003). Absennya dukungan sosial berupa komunitas pengguna, relawan digital, dan sosialisasi aktif dari pemerintah desa menyebabkan *social influence* yang dirasakan masyarakat terhadap SIBERAS sangat lemah. Kondisi ini selaras dengan temuan Djabbari et al. (2024) yang menekankan bahwa rendahnya sosialisasi dan minimnya pendampingan menyebabkan banyak warga tidak mengetahui keberadaan sistem informasi desa, apalagi memahami manfaatnya dalam mempermudah akses layanan (Djabbari et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Ada korelasi yang positif, kuat, dan signifikan antara tingkat literasi digital masyarakat dengan pemanfaatan layanan berbasis e-government melalui aplikasi SIBERAS di Desa Sipodeceng, dengan nilai koefisien korelasi $r = 0,875$ dan kontribusi pengaruh sebesar 76,6%. Semakin tinggi tingkat literasi digital masyarakat, semakin banyak layanan e-government yang digunakan; (2) Terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, yaitu faktor demografis (rendahnya tingkat pendidikan), keterbatasan akses infrastruktur digital, minimnya pengalaman penggunaan teknologi secara terarah, dan lemahnya dukungan sosial berupa pendampingan teknis.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan: (1) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemerintah Desa Sipodeceng perlu merumuskan strategi peningkatan literasi digital secara terstruktur melalui program sosialisasi dan pelatihan penggunaan SIBERAS secara berkala; (2) Peningkatan

infrastruktur digital dan pembentukan komunitas/relawan digital di tingkat desa sebagai rujukan masyarakat dalam menggunakan aplikasi; (3) Disarankan agar peneliti yang akan datang menyelidiki elemen tambahan seperti kepercayaan terhadap sistem (trust) dan motivasi penggunaan. Faktor-faktor ini belum dibahas dalam penelitian ini.

REFERENSI

- APJII, A. P. J. I. I. (2024). Profil pengguna internet Indonesia 2024. Jakarta: APJII.
- Bawden, D. (2008). Origins and concepts of digital literacy. *Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices*. <https://doi.org/10.1093/elt/ccr077>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Djabbari, A., Nurwati, E., & Nurdin, M. (2024). Penerapan e-government pada sektor pelayanan publik di Desa Tondowolio. *Jurnal Bangsa*, 3(2), 89–105. <https://doi.org/10.31947/jurnalbangsa.v3i2.xxx>
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.
- Firdamf, Wahidin, Ramdani, D., Biologi, H., & Badriah, L. (2025). Profil keterampilan literasi digital peserta didik dalam pembelajaran ipa. 4(4), 697–707.
- Indonesia, P. R. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/110985/perpres-no-95-tahun-2018>
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Informatika, Katadata, & Komunikasi, K. (2024). Indeks Literasi Digital Indonesia Tahun 2024. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. <https://data.komdigi.go.id/opendata/dataset/indeks-literasi-digital-indonesia>
- Khalik, S., Umar, N., Fedayyen, M. Y., Zain, S., & Nurhayati, S. (2023). Pendampingan Pemanfaatan Aplikasi Siberas sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik bagi Masyarakat Desa Lasilawa. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 902. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i2.7680>
- Mustanir, A., Rais, M., Razak, R., & Mursalat, A. (2021). Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dengan Teknologi Informasi dimasa Pandemi Covid-19 dalam Pelayanan Publik yang Less Contact. 5(5), 2–8.
- Nations, U. (2022). *E-Government Survey 2022: The future of digital government*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Passaretta, G., & J. Gil-Hernández, C. (2023). The early roots of the digital divide: socioeconomic inequality in childrens ICT literacy from primary to secondary schooling. In *Research Handbook on Digital Sociology*. <https://doi.org/10.4337/9781789906769.00026>
- Prasetyo, E. (2022). Digital Literacy and E-Government Service Utilization. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 72–84. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jap/article/view/25423>
- Salsabila, N. (2024). Kesiapan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. <https://doi.org/10.70214/vgpatb18>
- Sokpro, G. L. (2024). Barriers to e-government adoption in developing countries: Case study evidence. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.4018/IJPADA.xxx>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. <https://valfabeta.com/product/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-mpkk/>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 6 Juni 2026

technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
<https://doi.org/10.2307/30036540>

Weerakkody, V., El-Haddadeh, R., Al-Sobhi, F., Shareef, M. A., & Dwivedi, Y. K. (2013). Examining the influence of intermediaries in facilitating e-government adoption: An empirical investigation. *Government Information Quarterly*, 30(4), 466–473. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.06.001>